



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALI AMRAN
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 479557

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.360.206.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 298.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 219 m2/276 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 453.456.000
3. Tanah Seluas 1.461 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 36.525.000
4. Tanah Seluas 2.895 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 72.375.000
5. Tanah Seluas 1.256 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 31.400.000
6. Tanah Seluas 2.714 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 67.850.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/169 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **155.000.000**

1. MOTOR, HONDA TIGER SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
2. MOTOR, HONDA SPACY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000



3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2014,
HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.733.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.552.939.000

III. HUTANG Rp. 197.086.400

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.355.852.600

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.